



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANÁLISIS FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

OLEH :

ZARA HERZYA GAZI
06 151 060

Mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi

*Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2011**

No.Alumni Universitas	Zara Herzya Gazi	No.Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/15 September 1987 b) Nama Orang Tua : Agazi (Alm) (Ayah), Hernawaty Gazi (Ibu) c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No BP : 06 151 060 f) Tgl.Lulus : 2 Februari 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3.00 i) Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan j) Alamat Orang Tua : Perumdam 4 Blok L.10 Tunggul Hitam - 25176.		

ANALISA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPPENGARUHI PENERIMAAN DAN PERKEMBANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Skripsi S-1 Oleh Zara Herzya Gazi, Pembimbing Dr.Hefrizal Handra,M.Soc,Sc

ABSTRAK

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari pajak daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan pajak daerah terbesar guna membiayai pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor dan faktor – faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan adalah jumlah kendaraan bermotor, PDRB, dan Jumlah Karyawan Pemungut Pajak Kendaraan Bermotor. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder dari tahun 1999 – 2008. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan persamaan regresi ternyata faktor yang memiliki pengaruh positif dan signifikan adalah Jumlah Kendaraan Bermotor dan PDRB. Oleh karena itu PEMDA perlu meningkatkan kinerja dari karyawan pemungut pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan lebih berperan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di masa mendatang. Disamping itu PEMDA juga perlu mendorong wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem pendataan yang lebih baik dan berkualitas.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada 2 Februari 2010. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Dr.Hefrizal Handra,M.Soc,Sc	Drs. Masrizal, M.Soc. Sc	Dra. Wahyuni Eloisa Marinda, ME

Mengetahui,

Ketua Jurusan : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE.M.Ec.DEA.Ing

NIP.130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk mengadakan suatu perubahan dan kemajuan atau pertumbuhan, dimana pembangunan daerah juga merupakan suatu bagian dari integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moral maupun materil. Tujuan pembangunan yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur dan adil . Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah membutuhkan dana yang cukup besar setiap tahunnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali setiap potensi yang ada didaerahnya, baik itu potensi sumberdaya manusia (SDM) maupun potensi sumberdaya alam (SDA) semaksimal mungkin. Selain itu, pemerintah di tuntut untuk adil dalam melakukan proses pembangunan. Nilai keadilan dalam pelaksanaan pembangunan dapat dimaknai dengan adanya kesamaan jumlah barang dan jasa yang didapat, memiliki utilitas yang sesuai dengan masing-masing usaha dan tercapainya kepuasan maksimum masing-masing warga negara (Pratama, 1999).

Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan daerah lebih dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Daerah propinsi adalah Daerah Otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang

didelegasikan kepada Gubernur. Propinsi bukan merupakan daerah atasan kabupaten atau daerah kota. Jadi antara Daerah Otonom Propinsi dengan Daerah Otonom Kabupaten atau Daerah Kota tidak memiliki hubungan hierarki.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan/daerah, bahwa Penerimaan Daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - 1 Hasil Pajak Daerah
 - 2 Hasil Retribusi Daerah
 - 3 Hasil Perusahaan Milik daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
 - 4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan terdiri dari :
 - 1 Bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam.
 - 2 Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain – lain penerimaan sah.

Makin luas otonomi daerah diberikan oleh suatu daerah, makin besar tanggung jawab daerah serta makin besar biaya penyelenggaraannya. Itulah

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat terus meningkat setiap tahun. Peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikarenakan oleh semakin banyaknya kendaraan yang ada di Sumatera Barat. Jumlah kendaraan yang diteliti adalah kendaraan bermotor roda empat dan sepeda motor yang membayar pajak, yaitu Mobil sedan, jeep, buss, pick-up / truck dan sepeda motor. Tahun 1999 jumlah kendaraan bermotor hanya sebanyak 283.262 unit dan tahun 2008 meningkat menjadi 1.426.158 unit, rata – rata meningkat 8,99 % setiap tahun. Selain itu adanya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus meningkat juga disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta semakin baiknya atas pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara terpadu melalui sistem yang disebut SAMSAT. Adapun peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari RP.30.481.451.800 tahun 1999 menjadi Rp. 214.007.572.186 pada tahun 2008. Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut rata – rata penerimaan

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlia, 2001. *"Pajak Kendaraan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat"*, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang.
- Depdagri , 1996. *"Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah"*, BAKM Depkeu, USAID,.
- Devas, Nick dkk., 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI – press,.
- Linda, Ernawati, 2002. *"Analisa Potensi dan Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau"*, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang.
- Handra, Hafrizal, 2001. *"Penggalian Potensi Pendapatan Daerah,"* Workshop Manajemen Strategik dan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Kerjasama SIAGA Project UGM dengan PSKD Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- Hamdani, Aini,1985. *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Host, Viggo, and Andersen, Michael Knie, 2004. *Modeling Customer Satisfaction In Mortgage Credit Companies*, Emerald, The International Journal Of Marketing, Denmark.
- Nazara, Suahasil, 1997. *"Struktur Penerimaan Daerah Tingkat Propinsi Di Indonesia,"* PRISMA.